



Judul	: Penundaan Legislasi RUU PPRT Dipertanyakan
Tanggal	: Jumat, 10 Maret 2023
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 8

REGULASI

Penundaan Legislasi RUU PPRT Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Nasib Rancahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Dewan Perwakilan Rakyat kembali berada dalam ketidakpastian menyusul munculnya pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (9/3/2023) mengenai penundaan proses legislasi RUU itu. Para pekerja rumah tangga dan organisasi pendukung menyatakan kecewa dengan langkah pimpinan DPR.

"Kami menyesalkan sikap Ketua DPR yang tak memihak pada pengesahan UU PPRT yang sudah 19 tahun diperjuangkan para PRT dan masyarakat sipil, dan juga sudah didukung Presiden Joko Widodo pada 18 Januari 2023," ujar Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), di Jakarta, Kamis (9/3/2023) petang.

Dalam keterangan pers yang beredar di kalangan media, Puan menyatakan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Sebab, RUU itu belum dibahas dalam Rapat Badan

Musyawarah (Bamus).

Penundaan proses legislasi RUU PPRT diputuskan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR sekitar 1 tahun 6 bulan lalu, yakni 21 Agustus 2021. Puan menegaskan, surat Badan Legislasi tentang RUU PPRT sudah dibahas dalam rapat pimpinan DPR waktu itu.

Pada rapim itu, pimpinan DPR menyetujui untuk melihat situasi lebih dahulu. "Saat itu dirasa belum tepat diagendakan dalam rapat Bamus dan memerlukan pendalaman," ungkap Puan secara tertulis.

Penundaan tersebut dilakukan karena RUU PPRT belum diagendakan dalam rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna. Adapun sidang paripurna itu untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Sebab, berdasarkan mekanisme di DPR, untuk bisa dibawa ke sidang paripurna, RUU PPRT harus lebih dulu dibahas dalam rapat Bamus dan disetujui.

Meski demikian, Puan menyatakan, DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat, dengan memperhatikan situasi yang berkembang saat ini. Ia memastikan DPR akan

mendengar aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

Konfirmasi

Secara terpisah, Ketua Paniait Kerja PPRT di Baleg DPR, Willy Aditya menyatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa dalam Bamus yang berlangsung 9 Februari 2023, Fraksi Partai Nasdem menegaskan, RUU PPRT untuk segera dibahas dalam sidang paripurna DPR. Jawaban di dalam Bamus itu masih di meja Ketua DPR selaku pimpinan sidang.

"Kami punya Wakil Ketua DPR, sedang kami konfirmasi apakah benar itu keputusan rapim, dan rapim kapan keputusan tersebut itu terjadi. Tentu ini satu hal yang sangat disayangkan dengan kondisi seperti ini," ungkap Willy.

Lita Anggraini mempertanyakan keputusan Ketua DPR tersebut. Sikap Puan terkait RUU itu dinilai kontra dengan sikap semua pemimpin fraksi dan para wakil Ketua DPR yang menyatakan mendukung, terutama setelah pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Ketua DPR justru memakai argumentasi rapim tahun lalu

yang tak relevan untuk menunda pengesahan RUU PPRT. Sudah 19 tahun RUU PPRT terkatung-katung, kok Bu Puan masih tega menggantung tersebut," kata Lita.

Karena itu, JALA PRT dan Serikat PRT (SPRT) meminta pada ketua dan pimpinan DPR agar segera menggelar rapim. Harapannya, rapim tersebut mengagendakan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR pada masa sidang ini, 14 Maret 2023.

Mereka meminta Ketua DPR jangan lagi mengulur dan berkilah yang berujung pada keputusan mengorbankan para PRT. Karena itu, Ketua DPR diminta berdialog langsung dengan para PRT serta korban kekerasan agar memahami situasi kedaruratan yang dihadapi para PRT.

Kekecewaan juga diungkapkan para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Sipil UU PPRT. Mereka menilai penundaan itu jadi cara DPR mengulur waktu untuk membuat lelah para PRT. Selanjutnya DPR sibuk dengan tahun politik. Dalam keterangan pers, Kamis petang kemarin, para PRT mempertanyakan sikap Ketua DPR. (SON)